



# **RENJA 2020**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

## KATA PENGANTAR

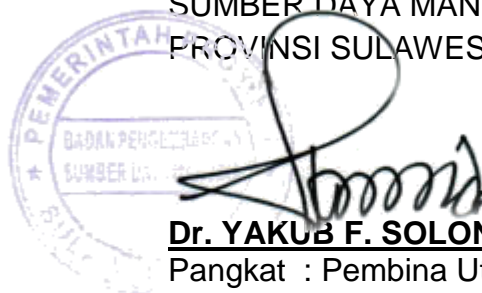
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Rancangan Rencana Kerja ini merupakan gambaran arah dan tujuan awal dari proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan pelayanan publik Perangkat Daerah tahun 2020.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan terhadap penyusunan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020. Dalam rangka mencapai kesempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, kami membuka pintu untuk menerima saran dan masukan menuju arah yang lebih baik.

Mamuju, 1 Agustus 2019

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SULAWESI BARAT,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat. The stamp contains the text 'PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT' around the perimeter and 'BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

**Dr. YAKUB F. SOLON, SH,M.Pd**

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19651005 198812 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Landasan Hukum.....	2
I.3. Maksud dan Tujuan .....	5
I.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU.....	7
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	11
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	12
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	15
II.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	19
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN.....	20
III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	20
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	24
III.3. Program dan Kegiatan .....	25
BAB IV : PENUTUP	28

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Barat .....	8
Tabel 2.3. Review Rancangan Awal RKPD 2019.....	16
Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 20121.	26

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/ Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renja PD).

Secara hierarki penyusunan rencana kerja PD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sejalan dengan dasar pemikiran di atas maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2019 menyusun Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020. Renja PD merupakan dokumen Rencana Pembangunan PD jangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.

Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat disusun dengan memperhatikan Visi Kepala Daerah, yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022 yaitu :

***“Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq”.***

Adapun penjelasan makna dari pernyataan Visi tersebut, adalah :  
**Sulawesi Barat Maju** : Komitmen untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Barat yang sejajar dengan Provinsi lainnya yang didukung oleh konektivitas wilayah dan daya saing yang tinggi serta berorientasi pada lingkungan.

**Sulawesi Barat Malaqbiq** : Komitmen untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik berdasarkan kearifan lokal dengan dukungan masyarakat yang yang berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya dan religius.

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020 dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020.

## **I.2. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 49);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);



19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 08 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017;
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renja PD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat adalah:

1. Sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan anggaran tahun 2020;
2. Sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020;
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD ditahun selanjutnya.

Adapun tujuan dari Renja PD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat adalah;

1. Tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Terlaksananya program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2020;
3. Meningkatnya capaian target program dan kegiatan tahun 2020.

#### **I.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Renja PD Tahun Anggaran 2020, mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal PD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

##### **BAB IV. PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

#### **II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaksanaan Renja PD dikaitkan juga dengan pencapaian target Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022, berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang telah ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 pada tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat dan Pencapaian Renstra PD Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Barat

**BADAN PENGEMBANGAN SDM**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2019		
					Target Renja OPD Tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	<b>PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran</b>			<b>2.039.613.461,00</b>			<b>96,68</b>		<b>156,92</b>	
1.20.1.20.10.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	5 tahun	1 tahun	764.875.000,00	1 tahun	1 tahun	99,21	1 tahun	4	80
1.20.1.20.10.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	5 tahun	1 tahun	63.153.600,00	1 tahun	1 tahun	95,57	1 tahun	4	80
1.20.1.20.10.01.006.	Penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Daerah dinas/operasional	Jumlah penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Daerah	5 tahun	1 tahun	24.500.000,00	1 tahun	1 tahun	99,80	1 tahun	4	80
1.20.1.20.10.01.008.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	5 tahun	1 tahun	126.852.760,00	1 tahun	1 tahun	96,53	1 tahun	4	80
1.20.1.20.10.01.010.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	5 tahun	1 tahun	13.478.000,00	1 tahun	1 tahun	96,27	1 tahun	4	80
1.20.1.20.10.01.011.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Cetak dan Penggandaan	5 tahun	1 tahun	62.600.500	1 tahun	1 tahun	99,72	1 tahun	4	80
1.20.1.20.10.01.012.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan		5 tahun	1 tahun	243.810.000,00	1 tahun	1 tahun	99,49	1 tahun	4	80
1.20.1.20.10.01.003.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bln	2 tahun	1 tahun	43.160.000,00			99,91	18 unit	20	1.000
1.20.1.20.10.01.003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat-alat Rumah Tangga yang Diadakan			3.910.000,00			98,24			
1.20.1.20.10.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	5 tahun	1 tahun	38.780.000,00	1 tahun	1 tahun	99,85	1 tahun	4	80
1.20.1.20.10.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Rapat yang dilaksanakan	5 tahun	1 tahun	65.019.000,00	1 tahun	1 tahun	98,25	1 tahun	4	80
1.20.1.20.10.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	5 tahun	1 tahun	246.479.521,00	1 tahun	1 tahun	99,87	1 tahun	4	80
1.20.1.20.10.01.019.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	5 tahun	1 tahun	186.726.000,00	1 tahun	1 tahun	99,74	1 tahun	4	80
1.20.1.20.10.01.124.	Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen Rapat Koordinasi BPSDM Se-Provinsi Sulbar	5 dokumen	1 dokumen	156.269.080,00	1 dokumen	1 dokumen	97,67	1 dokumen	4	80
	<b>PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja (%)</b>			<b>199.800.000,00</b>			<b>1,00</b>		<b>151,40</b>	
1.20.1.20.10.02.007.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	163 unit	-	199.800.000,00	163 unit	163 unit	1,00	-	163	163
	<b>PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur</b>			<b>103.500.000</b>			<b>0,97</b>		<b>73,47</b>	
1.20.1.20.10.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	840 orang	313 orang	46.450.000,00			0,93	120 stel	433	52
1.20.1.20.10.03.005.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	721 orang	145 orang	57.050.000,00	168 orang	168 orang	1,00		313	43

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2019	
						Target Renja OPD Tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal 80 jam pelajaran pertahun</b>		1.041 orang	922.541.700,00	823 orang	629 orang	0,99			52,12
1.20.1.20.10.05.025.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah orang yang mengikuti Diklat Kompetensi Dan Pengembangan Widyaiswara	334 orang	33 orang	174.745.700,00	34 orang	24 orang	0,97	18 orang	75	22
	Diklat Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah										
	Diklat Bendahara Keuangan Daerah										
	Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja										
1.20.1.20.10.05.026.	Diklat Penyusunan Renja OPD	Jumlah orang yang mengikuti Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	188 orang	22 orang	398.076.000,00	22 orang	13 orang	0	25 orang	60	32
1.20.1.20.10.05.027.	Diklat Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat TOT Widyaiswara	120 orang	-	349.720.000,00	15 orang		1,00		-	-
	<b>PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Nilai akuntabilitas, persentase ketepatan penyampaian laporan Keuangan</b>			28.270.000,00			1,00			80,00
1.20.1.20.10.06.001.	Penyusunan laporan capaian kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	2 dokumen	10.540.000,00	1 dokumen	1 dokumen	1,00	1 dokumen	4	80
1.20.1.20.10.06.002.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	5 dokumen	2 dokumen	2.340.000,00	1 dokumen	1 dokumen	1,00	1 dokumen	4	80
1.20.1.20.10.06.004.	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5 dokumen	2 dokumen	2.340.000,00	1 dokumen	1 dokumen	1,00	1 dokumen	4	80
1.20.1.20.10.06.05.	Penyusunan Renstra/Renja/Lakip dan LPPD	Tersusunnya Rencana Startegis	1 dokumen	1 dokumen	4.350.000,00			1,00		-	
1.20.1.20.10.06.05.	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	2 dokumen	4.350.000,00	1 dokumen	1 dokumen	1,00	1 dokumen	4	80
1.20.1.20.10.06.05.	Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	2 dokumen	4.350.000,00	1 dokumen	1 dokumen	1,00	1 dokumen	4	80
	<b>PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR</b>	<b>Aparatur Sipil Negara yang sesuai kompetensi dengan tugas pokok dan Fungsi</b>			254.729.008,00			0,99			194,71
1.20.1.20.10.06.05.	Pendidikan Kepemimpinan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	2 dokumen	155.334.000,00	1 dokumen	1 dokumen	0,98	1 dokumen	4	80
1.20.1.20.10.06.05.	Peningkatan Kompetensi Sosial Kultural	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	2 dokumen	99.395.008,00	1 dokumen	1 dokumen	0,99	1 dokumen	4	80
	Diklat Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)										
	Pelatihan Revolusi Mental Bagi ASN										
	Diklat Training Officer Course (TOC)										
	Kerjasama Lembaga Kependidikan Formal dan Kepamong Prajaan										
	Studi Banding/Magang										
	Membentuk Tim Assesor										
	Pembentukan LSP Pemda										
	Pengembangan Widyaiswara										
	Pembuatan Perencanaan Pembangunan Pusdiklat BPSDM Prov. Sulbar										
	Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kediklitan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2019		
					Target Renja OPD Tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	<b>PROGRAM : PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR</b>	<b>Aparatur Sipil Negara yang sesuai kompetensi dengan tugas pokok dan Fungsi</b>		492.425.379,00			0,99			194,71	
1.20.1.20.10.06.05.	Pengembangan Widyaiswara	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	5 dokumen	2 dokumen	137.522.000,00	1 dokumen	1 dokumen	1,00	1 dokumen	4	80
1.20.1.20.10.06.05.	Diklat Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5 dokumen	2 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	4	80
1.20.1.20.10.06.05.	Melaksanakan Koordinasi Pusat, Kabupaten Bidang Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan dan Kerjasama	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Rangkuman Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	2 dokumen	147.155.389,00	1 dokumen	1 dokumen	0,98	1 dokumen	4	80
1.20.1.20.10.06.05.	Monev Pelaksanaan Kediklatan ke Kabupaten Se Sulawesi Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Rangkuman Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	2 dokumen	129.906.000,00	1 dokumen	1 dokumen	1,00	1 dokumen	4	80
1.20.1.20.10.06.05.	Pembentukan Tim Asesor LPSDN di Kabupaten Se Sulawesi Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Rangkuman Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	2 dokumen	77.841.990,00	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	4	80

## II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79); dan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok, membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah pada bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 16 Tahun 2016, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis, rencana, dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
- b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan Administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi ;
- f. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat, ada beberapa indikator kinerja guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Provinsi Sulawesi Barat;
2. Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Provinsi Sulawesi Barat;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang disesuaikan dengan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dari Indikator Kinerja diatas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat berupaya untuk meningkatkan kualitas aparatur melalui pengembangan kompetensi dengan mengikuti diklat, bimtek, workshop, sosialisasi dan seminar. Disamping itu juga diharapkan dengan keterampilan yang telah dimiliki dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga apa yang dicita-citakan dan diharapkan sebagai penyelenggara khususnya bidang Pengembangan SDM dapat terwujud.

### **II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.



Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pembinaan dan administrasi pelayanan kepegawaian baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan telaahan rencana strategis dari kementerian atau lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat.

Isu-isu strategis pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. Belum tersedianya gedung Pusdiklat yang representatif;
2. **BPSDM Prov. Sulawesi Barat belum mendapatkan sertifikat Akreditasi;**
3. Belum terakreditasi dan terstandarisasinya mekanisme / sistem pelaporan data dan informasi Kediklatan di Sulawesi Barat dan masih bersifat sektoral;
4. Belum maksimalnya jumlah tenaga Widyaiswara;
5. Belum memadainya dukungan anggaran BPSDM Provinsi Sulawesi Barat, baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN;
6. Belum tersedianya pedoman dan dokumen penyelenggaraan kegiatan pengembangan SDM yang memadai;
7. Belum terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) di Provinsi Sulawesi Barat;
8. Belum maksimalnya kompetensi sumberdaya manusia bidang Penyelenggaraan Kediklatan di Provinsi Sulawesi Barat;
9. Belum maksimalnya sinergitas Penyelenggaraan Pengembangan SDM antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi di Sulawesi Barat;
10. Pemetaan Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal sesuai dengan kompetensinya dan penerapan pelaksanaan uji kompetensi.

Tujuan yang telah dirumuskan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah: Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur dan Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas ASN untuk penerapan ke Pemerintahan yang lebih baik ; Sasaran yang ingin dicapai dalam manajemen Pengembangan SDM adalah:

1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara;
2. Meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara Lingkup BPSDM;
3. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN / Non ASN untuk perwujudan Pemerintahan yang terpercaya; dan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan Internal SKPD.

Strategi yang dilakukan untuk mendukung tujuan dan sasaran organisasi adalah:

1. Meningkatkan SDM aparatur sipil negara untuk pengembangan SDM aparatur sipil negara berdasarkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan fungsional, teknis dan pelatihan manajerial;
2. Meningkatkan kualitas kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui uji kompetensi;
3. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara melalui Pendidikan dan Pelatihan;
4. Rehabilitasi sarana dan prasarana menjadi kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima serta pengembangan pusat assesment center berbasis teknologi.

Sedangkan kebijakan yang diambil guna mendukung strategi tersebut adalah:

- Strategi : Meningkatkan SDM aparatur sipil negara untuk pengembangan aparatur sipil negara berdasarkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan fungsional, teknis dan pelatihan manajerial
- Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan teknis;
  - Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan fungsional;
  - Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;

- Melakukan seleksi terbuka bagi jabatan tinggi Provinsi Sulawesi Barat ;dan
- Peningkatan wawasan aparatur sipil negara melalui sosialisasi, seminar, dan penataran tentang penyelenggaraan kebijakan Aparatur Sipil Negara dalam sistem pemerintahan.

#### **II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh PD Provinsi dalam menyusun rancangan Renja PD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun 1 (satu) tahun.

**TABEL II.3. Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Barat**

**BADAN PENGEMBANGAN SDM**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang baik</b>	<b>100 %</b>	<b>1.940.054.300.00</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang baik</b>	<b>100 %</b>	<b>1.940.054.300.00</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju	Jumlah Surat yang Terkirim	1 Tahun	536.750.000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju	Jumlah Surat yang Terkirim	1 Tahun	536.750.000.00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Mamuju	Jumlah Jenis Tagihan Rekening / Kwitansi	1 Tahun	221.710.300.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Mamuju	Jumlah Jenis Tagihan Rekening / Kwitansi	1 Tahun	221.710.300.00	
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Mamuju	Jumlah Jaminan Barang Milik Daerah		25.500.000.00	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Mamuju	Jumlah Jaminan Barang Milik Daerah		25.500.000.00	
4	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Mamuju	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan	1 Tahun	195.144.000.00	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Mamuju	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan	1 Tahun	195.144.000.00	
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Mamuju	Jumlah Peralatan Kantor yang diperbaiki	1 Tahun	30.000.000.00	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Mamuju	Jumlah Peralatan Kantor yang diperbaiki	1 Tahun	30.000.000.00	
6	Penyediaan Barang cetakan dan Pengadaan	Mamuju	Jumlah Barang Cetak	1 Tahun	56.000.000.00	Penyediaan Barang cetakan dan Pengadaan	Mamuju	Jumlah Barang Cetak	1 Tahun	56.000.000.00	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Beli	1 Tahun	198.000.000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Beli	1 Tahun	198.000.000.00	
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mamuju	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Di Beli	1 Tahun	3.930.000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mamuju	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Di Beli	1 Tahun	3.930.000.00	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	36.840.000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	36.840.000.00	
10	Penyediaan Makan dan Minum	Mamuju	Jumlah ASN dan Non ASN	1 Tahun	71.180.000.00	Penyediaan Makan dan Minum	Mamuju	Jumlah ASN dan Non ASN	1 Tahun	71.180.000.00	
11	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Mamuju	Jumlah ASN Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang diikuti	1 Tahun	265.000.000.00	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah	Mamuju	Jumlah ASN Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang diikuti	1 Tahun	265.000.000.00	
12	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	Mamuju	Jumlah ASN Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Yang diikuti	1 Tahun	300.000.000.00	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	Mamuju	Jumlah ASN Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Yang diikuti	1 Tahun	300.000.000.00	

Renja BPSDM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 II-16

<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>158.740.000.00</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>158.740.000.00</b>	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Mamuju	Jumlah Kendaraan Operasional yang di Adakan	6 unit	158.740.000.00	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Mamuju	Jumlah Kendaraan Operasional yang di Adakan	6 unit	158.740.000.00	
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>99.390.000.00</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>99.390.000.00</b>	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Mamuju	Jumlah Pasang Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	56 Stel	46.300.000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Mamuju	Jumlah Pasang Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	56 Stel	46.300.000.00	
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Mamuju	Jumlah Pasang Pakaian Hari-Hari Tertentu	56 Stel	53.090.000.00	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Mamuju	Jumlah Pasang Pakaian Hari-Hari Tertentu	56 Stel	53.090.000.00	
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>1.068.185.000.00</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>575.916.600</b>	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Mamuju	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	25 Orang	205.000.000.00	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Mamuju	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	25 Orang	205.000.000.00	
2	Diklat Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	Mamuju	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pengelolaan Aset/BMD	30 Orang	220.140.000.00	Diklat Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	Mamuju	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pengelolaan Aset/BMD	30 Orang	220.140.000.00	
3	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	Mamuju	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	30 Orang	220.140.000.00	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	Mamuju	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	30 Orang	220.140.000.00	
4	Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	Mamuju	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Dasar Satpol PP	30 Orang	422.905.000.00	Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	Mamuju	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Dasar Satpol PP	30 Orang	422.905.000.00	
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>32.950.000.00</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>32.950.000.00</b>	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD	12 Laporan	6.620.000.00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD	12 Bulan	6.620.000.00	
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan semesteran	2 Laporan	5.020.000.00	Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan semesteran	2 Dokumen	5.020.000.00	
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	5.020.000.00	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	5.020.000.00	
4	Penyusunan Renstra/Renja/Lakip dan LPPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Renstra/Renja/Lakip dan LPPD	5 Dokumen	5.020.000.00	Penyusunan Renstra/Renja/Lakip dan LPPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Renstra/Renja/Lakip dan LPPD	2 Dokumen	5.020.000.00	
5	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen RKA/DPA-SKPD	2 Dokumen	5.350.000.00	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen RKA/DPA-SKPD	2 Dokumen	5.350.000.00	
6	Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-P/DPPA - SKPD	2 Dokumen	6.020.000.00	Penyusunan RKA-P/DPPA - SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-P/DPPA - SKPD	1 Dokumen	6.020.000.00	

VI	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur				4.200.680.700.00	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur				4.200.680.700.00	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan (DIKLATPIM)	Mamuju	Jumlah Pejabat Eselon IV yang Mengikuti Diklat PIM IV	53 Orang	1.495.392.200.00	Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan (DIKLATPIM)	Mamuju	Jumlah Pejabat Eselon IV yang Mengikuti Diklat PIM IV	53 Orang	1.495.392.200.00	
2	Peningkatan Kompetensi Sosial Kultural	Mamuju	Jumlah ASN dan Non ASN yang Mengikuti Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Sosial Kultural	100 Orang	160.000.000.00	Peningkatan Kompetensi Sosial Kultural	Mamuju	Jumlah ASN dan Non ASN yang Mengikuti Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Sosial Kultural	100 Orang	160.000.000.00	
3	Diklat Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)	Mamuju	Jumlah Pejabat P2UPD yang Mengikuti Diklat Fungsional	30 Orang	291.574.500.00	Diklat Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)	Mamuju	Jumlah Pejabat P2UPD yang Mengikuti Diklat Fungsional	30 Orang	291.574.500.00	
4	Diklat Revolusi Mental Bagi ASN	Mamuju	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Revolusi Mental	30 Orang	205.916.000.00	Diklat Revolusi Mental Bagi ASN	Mamuju	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Revolusi Mental	30 Orang	205.916.000.00	
5	Diklat Training Officer Course (TOC)	Mamuju	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Training Officer Course (TOC)	30 Orang	257.581.000.00	Diklat Training Officer Course (TOC)	Mamuju	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Training Officer Course (TOC)	30 Orang	257.581.000.00	
6	Kerjasama Lembaga Pendidikan Formal dan Kepamong Prajaan	Mamuju	Jumlah Dokumen Kerjasama	1 Kegiatan	57.000.000.00	Kerjasama Lembaga Pendidikan Formal dan Kepamong Prajaan	Mamuju	Jumlah Dokumen Kerjasama	1 Kegiatan	57.000.000.00	
7	Studi Banding/Magang	Mamuju	Jumlah ASN/Non ASN yang Mengikuti studi banding	1 Kegiatan	175.243.000.00	Studi Banding/Magang	Mamuju	Jumlah ASN/Non ASN yang Mengikuti studi banding	1 Kegiatan	175.243.000.00	
8	Membentuk Tim Asesor	Mamuju	Jumlah Dokumen	1 Kegiatan	185.748.000.00	Membentuk Tim Asesor	Mamuju	Jumlah Dokumen	1 Kegiatan	185.748.000.00	
9	Pembentukan LSP Pemda	Mamuju	Jumlah Dokumen	1 Kegiatan	157.226.000.00	Pembentukan LSP Pemda	Mamuju	Jumlah Dokumen	1 Kegiatan	157.226.000.00	
10	Pengembangan Widyaiswara	Mamuju	Jumlah Widyaiswara yang Mengikuti Diklat Pengembangan	1 Kegiatan	215.000.000.00	Pengembangan Widyaiswara	Mamuju	Jumlah Widyaiswara yang Mengikuti Diklat Pengembangan	1 Kegiatan	215.000.000.00	
11	Pembuatan Perencanaan Pembangunan Pusdiklat BPSDM Prov.Sulbar	Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Kegiatan	1.000.000.000.00	Pembuatan Perencanaan Pembangunan Pusdiklat BPSDM Prov.Sulbar	Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Kegiatan	1.000.000.000.00	
12	Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kediklatan										

## **II.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada pelaksanaan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020, terdapat beberapa usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan ( pokok –pokok pikiran ) tetapi bukan kewenangan kami di BPSDM dan tidak ada di Renja, program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Sebagai salah satu satuan kerja perangkat pemerintah daerah Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 dan direvisi menjadi Revisi Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022, mencerminkan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022. Secara spesifik program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis merupakan upaya untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sinkronisasi antara program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis akan memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan

Disisi lainya Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 yang telah direvisi menjadi Revisi Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022, dalam implementasinya tidak dapat dipisahkan dari norma, peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pembinaan aparatur sipil negara yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat, secara nasional juga memiliki hubungan yang signifikan dengan dokumen Rencana Strategis kementerian/kelembagaan.

Dalam hal ini program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 yang telah direvisi menjadi Revisi Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022, disinkronisasikan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dari Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan. Telaahan strategis



berdasarkan Rencana Strategis terhadap 3 (tiga) kementerian/kelembagaan adalah sebagai berikut:

**1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.**

Sebagai lembaga pembina aparatur sipil negara Kementerian PAN-RB Memiliki *visi* “**Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompeten dan Melayani**” dan *misi* “**Penggerak Utama Reformasi Birokrasi**”. Hal ini dicapaidengan tujuan strategis, yaitu:

- a. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien;
- b. Terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan kompetitif;
- c. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani;
- d. Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta akuntabel;
- e. Mewujudkan aparatur Kementerian PAN-RB yang profesional dan berkinerja tinggi.

Tujuan strategi ini dicapai dengan strategi percepatan reformasi birokrasi, yaitu:

- a. Penataan struktur birokrasi;
- b. Penataan jumlah, dan distribusi pegawai negeri sipil;
- c. Sistem seleksi calon pegawai negeri sipil dan promosi pegawai negeri sipil secara terbuka
- d. Profesionalisasi pegawai negeri sipil;
- e. Pengembangan sistem elektronik pemerintah (*e-government*)
- f. Peningkatan pelayanan publik;
- g. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur;
- h. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri;
- i. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri sipil.

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi aparatur sipil negara dan program peningkatan kesejahteraan aparatur.

## **2. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;**

Lembaga Administrasi Negara (LAN), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil.

Visi yang ingin diwujudkan LAN adalah ***“Menjadi Institusi Yang Handal Dalam Pengembangan Sistem Administrasi Negara Dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Negara”***.

Sedangkan misi adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui:

- a. Perumusan kebijakan dalam bidang administrasi negara; Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi negara;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- c. Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- d. Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara;
- e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi dan peningkatan kapasitas organisasi LAN.

Dengan mengacu pada rencana strategis LAN diketahui bahwa program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rencana strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat, mempedomani pembinaan pelaksanaan pendidikan aparatur negara yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

### **3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang merupakan salah satu unit organisasi dari Kementerian Dalam Negeri, memiliki visi ***“Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Yang Profesional dan Berkesinambungan”*** yang dicapai melalui 7 (tujuh) misi yaitu:

- a. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan;
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tenaga kediklatan;
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan;
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- e. Melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;
- g. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan telaahan lingkungan strategis dari 3 (tiga) Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga sebagaimana dipaparkan diatas, maka dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kepegawaian, serta mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat di bidang aparatur maka isu-isu strategis ditingkat Pemerintah Pusat atau nasional yang terkait dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- b. Meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia aparatur pemerintah;
- c. Melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi di tingkat pusat dan daerah secara bertahap;

- d. Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kemajuan teknologi;
- e. Menyusun pedoman pembinaan dan pengembangan aparatur sesuai otonomi daerah menyiapkan peraturan - peraturan maupun petunjuk teknis tentang pembinaan dan pengembangan aparatur;

### III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 2020

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat selaku institusi yang dipercaya sebagai pemegang peran sentral dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur yang profesional, untuk itu disusun Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah disusun dengan memperhatikan Visi Kepala Daerah, yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 yaitu : ***“Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Kompeten dan Profesional di Sulawesi Barat “***

Adapun misi yang ingin dijalankan berdasarkan visi diatas adalah :

1. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi;
2. Menyelenggarakan Sertifikasi dan Uji Kompetensi Pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara;
3. Mengembangkan kualitas, kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
4. Meningkatkan Kerjasama antar Instansi yang terkait dengan Pengembangan SDM;

5. Meningkatkan sarana dan Prasarana Kediklatan yang Refresentatif;
6. Mendorong terbentuknya BPSDM sebagai Lembaga Kediklatan yang terakreditasi;

Secara konseptual, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi akan membantu semua komponen untuk memahami substansi yang terkandung dalam visi. Dengan demikian, rumusan misi yang baik akan memberikan panduan kejelasan arah bertindak semua komponen untuk menentukan arah kebijakan, program hingga kegiatan yang berorientasi pada visi organisasi.

### **III.3. Program dan Kegiatan**

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat mendefenisikan seluruh Sasaran Strategis, kebijakan, program, dan kegiatan yang diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolak ukur (benchmarks) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode. Adapun rincian rencana kegiatan perprogram serta indikator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 sebagai terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 ( N )				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
<b>3.00.3.00.03.01.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik</b>		<b>100 Persen</b>	<b>1.940.054.300,00</b>				<b>5.657.727.288</b>
3.00.3.00.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim selama 12 bln	Mamuju	520 Surat	649.000.000,00	APBD	-	3075 Surat	23.517.000
3.00.3.00.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Pembayaran penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 12 bln	Mamuju	5 rekening	267.000.261.02	APBD	-	1 Tahun	973.845.000
3.00.3.00.03.01.01.005.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan yang di Asuransikan	Mamuju	6 Unit	30.000.000,00	APBD	-	150 Unit	1.301.500.000
	Penyediaan ATK	Jumlah jenis ATK	Mamuju	34 item	82.000.000,00				
3.00.3.00.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan Kendaraan dan STNK Tahun Berjalan	Mamuju	6 Unit Roda Empat 29 Unit Roda Dua	206.000.000,00	APBD	-	10 Unit Mobil dan 4 Unit Motor	190.691.514
3.00.3.00.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa Peralatan Kantor yang diperbaiki	Mamuju	30 Unit	36.000.000,00	APBD	-	27 Orang	703.500.000
3.00.3.00.03.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah tersedianya jenis atau item barang cetakan dan penggandaan untuk 12 bln	Mamuju	266 Eksampul	70.000.000,00	APBD	-	26 Item	100.500.000
3.00.3.00.03.01.01.003.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju	10 Unit	500.000.000,00	APBD		20 Unit	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Mamuju	1 paket	300.000.000,00	APBD		20 Buah	
3.00.3.00.03.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan majalah yang tersedia	Mamuju	528 Exp	36.840.000,00	APBD	-	1488 Exp/140 Buku	159.951.200
3.00.3.00.03.01.01.017.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Makan Minum Rapat Tamu dan Kegiatan	Mamuju	4620 Ok	71.180.000,00	APBD	-	4620 Ok	202.000.000
3.00.3.00.03.01.01.018.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Mamuju Luar Daerah	12 Bulan	265.000.000,00	APBD	-	12 Bulan	852.781.582
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Kabupaten	Mamuju Dalam Daerah	12 Bulan	300.000.000,00	APBD		12 Bulan	
<b>3.00.3.00.03.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja</b>		<b>100 Persen</b>	<b>250.740.000,00</b>				<b>1.508.580.000</b>
3.00.3.00.03.01.02.022.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional	Mamuju	1 Unit	250.740.000,00	APBD	-	2 Unit	1.275.000.000

<b>3.00.3.00.03.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur</b>		<b>100 Persen</b>	<b>99.390.000,00</b>				<b>1.101.862.320</b>
3.00.3.00.03.01.03.006.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pasang Pakaian Dinas beserta pe Perlengkapannya	Mamuju	56 Orang	46.300.000,00	APBD		56 Orang	62.240.000
3.00.3.00.03.01.03.013.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah pasang pakaian hari-hari tertentu	Mamuju	56 Orang	53.090.000,00			56 Orang	180.000.000
<b>3.00.3.00.03.01.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara</b>		<b>100 Persen</b>	<b>1.068.185.000,00</b>				<b>612.000.000</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	Luar Daerah	20 Orang	205.000.000,00			30 Orang	
3.00.3.00.03.01.03.013.	Diklat Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah Peserta Diklat	Mamuju	30 Orang	220.140.000,00			1 Dokumen	180.000.000
3.00.3.00.03.01.03.013.	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Peserta Diklat	Mamuju	30 Orang	220.140.000,00			30 Orang	180.000.000
3.00.3.00.03.01.03.013.	Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peserta Diklat	Mamuju	30 Orang	422.905.000,00			30 Orang	180.000.000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>32.950.000,00</b>				<b>18.762.259.554</b>
3.00.3.00.03.01.03.013.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	Mamuju	12 Laporan	6.620.000,00			12 Laporan	180.000.000
3.00.3.00.03.01.03.013.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan	Mamuju	1 Laporan	5.020.000,00			1 Laporan	180.000.000
3.00.3.00.03.01.03.013.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan	Mamuju	1 Laporan	5.020.000,00			1 Laporan	180.000.000
3.00.3.00.03.01.03.013.	Penyusunan Renstra/Renja/Lakip dan LPPD	Jumlah Dokumen	Mamuju	4 Dokumen	5.020.000,00			4 Dokumen	180.000.000
3.00.3.00.03.01.03.013.	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	Mamuju	1 Dokumen	5.350.000,00			1 Dokumen	180.000.000
3.00.3.00.03.01.03.013.	Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD	Jumlah Dokumen	Mamuju	1 Dokumen	6.020.000,00			1 Dokumen	180.000.000
<b>3.00.03.3.00.03.01.17.</b>	<b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Persentase Jumlah Penataan Pengembangan Manajemen ASN Yang Profesional</b>		<b>100 Persen</b>	<b>4.200.680.700,00</b>				<b>7.784.199.552</b>
3.00.3.00.03.01.03.013.	Diklat Kepemimpinan	Jumlah Peserta Diklat	Mamuju	53 Orang	1.495.392.200,00			60 Orang	180.000.000
3.00.3.00.03.01.03.013.	Diklat Prajabatan / Latsar	Jumlah Peserta Diklat	Mamuju	276 Orang	160.000.000,00			100 Orang	180.000.000
3.00.3.00.03.01.03.013.	Diklat Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)	Jumlah Peserta Diklat	Mamuju	30 Orang	291.574.500,00			30 Orang	180.000.000
3.00.3.00.03.01.03.013.	Diklat Revolusi Mental Bagi ASN	Jumlah Peserta Diklat	Mamuju	30 Orang	205.916.000,00			30 Orang	180.000.000
3.00.3.00.03.01.03.013.	Diklat Treaning Officer Course (TOC)	Jumlah Peserta Diklat	Mamuju	30 Orang	257.581.000,00			30 Orang	180.000.000
3.00.3.00.03.01.03.013.	Kerja Sama Lembaga Kependidikan Formal dan Kepamong Prajaan	Jumlah Dokumen	Mamuju	1 Dokumen	57.000.000,00			1 Dokumen	180.000.000
3.00.3.00.03.01.03.013.	Studi Banding/Magang	Jumlah ASN /Non ASN yang mengikuti Studi Banding	Mamuju	20 Orang	175.243.000,00			30 Orang	180.000.000
3.00.3.00.03.01.03.013.	Pembentukan Tim Assesor	Jumlah Dokumen	Mamuju	1 Dokumen	185.748.000,00			1 Dokumen	180.000.000
3.00.3.00.03.01.03.013.	Pembentukan LSP Pemda	Jumlah Dokumen	Mamuju	1 Dokumen	157.226.000,00			1 Dokumen	180.000.000
3.00.3.00.03.01.03.013.	Pengembangan Widyaiswara	Jumlah Widyaiswara yang ikut Diklat	Mamuju	6 Orang	215.000.000,00			10 Orang	180.000.000
3.00.3.00.03.01.03.013.	Pembuatan Perencanaan Pemangunan Pusdiklat BPSDM Prov. Sulbar	Jumlah Dokumen Perencanaan	Mamuju	1 Dokumen	1.000.000.000,00				

## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2020 yang tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SULAWESI BARAT,



**Dr. YAKUB F. SOLON, SH, M.Pd**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19651005 198812 1 002





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
Alamat : Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat Sayap Kanan Gedung II Lantai I  
Jl. Abdul Malik Pattana Endeng Nomor : 1 Rangas. Mamuju 91512

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**NOMOR : /BPSDM//VIII/2019  
TENTANG  
PENGESAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dipandang perlu menetapkan Pengesahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);


6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 49);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Sulawesi Barat Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8 tahun 201);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis sebagai bagian dari Perangkat Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020;
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan maupun kekhilafan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal : 1 Agustus 2019

KEPALA BADAN,



**D. YAKUB F. SOLON, SH,M.Pd**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip. 19651005 198812 1 002